

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan pembangunan ekonomi menciptakan ketersediaan lapangan kerja untuk keseimbangan angkatan kerja yang meningkat (Ridwan, 2016). Menurut Sukirno, pembangunan ekonomi adalah proses kenaikan pendapatan perkapita dalam meningkatkan perkembangan negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dampak dari maraknya pembangunan akan menjadi magnet bagi penduduk yang berdatangan dari berbagai daerah dengan kepentingan ingin mencari pekerjaan. Hal tersebut yang dinamakan Urbanisasi. Urbanisasi identik dengan perpindahan masyarakat dari desa ke kota dengan tujuan untuk tinggal dan menetap di perkotaan. Sedangkan migrasi penduduk yaitu perpindahan yang terjadi pada penduduk dalam waktu sementara atau tidak menetap pada daerah tempat tinggalnya.

Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan penduduk sangat tinggi di negara berkembang, termasuk negara Indonesia yang berada pada urutan penduduk terbesar keempat di dunia setelah Amerika Serikat. Proses terjadinya jumlah penduduk daerah perkotaan yang meningkat mencerminkan keadaan adanya migrasi karena memberikan pengaruh perubahan pada aspek ekonomi dan sosial. Jumlah pertumbuhan penduduk yang meningkat maka kebutuhan berbagai sarana dan prasarana seperti tempat pendidikan, tempat tinggal dan transportasi juga akan semakin banyak (Ajriah, 2019).

Keadaan dari berpindahan penduduk menjadi salah satu mobilitas masyarakat untuk berbondong-bondong melakukan berpindahan dari desa ke kota atau yang disebut urbanisasi, urbanisasi menjadikan proses penambahan jumlah penduduk di perkotaan. Perpindahan yang dilakukan penduduk tidak menjadi selalu kebijakan yang tepat dalam menanggulangi memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi dengan meningkatnya penduduk urbanisasi akan terjadi tingkat kemiskinan dan pengangguran karena adanya jumlah penduduk urbanisasi yang tidak terkendalikan (Harahap, 2013).

Salah satu penyebab urbanisasi adalah tingginya jumlah penduduk yang berpindah dengan dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi. Akibatnya banyak masyarakat menjadi daya tarik penduduk di wilayah kota untuk memperoleh pekerjaan. Dengan demikian, urbanisasi menjadi sesuatu perubahan masyarakat dalam sosial ekonomi yang dinilai sebagai bentuk proses hasil upaya peningkatan kesejahteraan penduduk (Sadono sukirno, 2011).

Menurut teori Malthus, penambahan jumlah penduduk dapat disebabkan beberapa faktor. Beberapa diantaranya adalah tingkat kelahiran yang tinggi, tingkat kematian, dan migrasi. Namun dalam teori ini memiliki kelemahan. Dalam teori Malthus ini tidak memperhitungkan implikasi sosial-ekonomi dan teknologi untuk pengendalian pertumbuhan penduduk.

Dari adanya urbanisasi memiliki sisi bagian positif, yang dimana sebagai bentuk usaha pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan tidak terbatas dalam pagar administrasi kota. Kota yang dianggap masyarakat sebagai modernisasi industri

diharapkan mampu menjadi tempat pemusatan dalam mengasah keahlian, daya kreasi dan fasilitas memadai bagi pembangunan (ramadhani harahab, 2013).

Kota menjadi tempat dimana tujuan bagi pelaku urbanisasi secara langsung membuat keadaan perkotaan tidak terkendali karena jumlah urbanisasi yang meningkat secara terus-menerus. Dari fenomena yang terjadi memberikan masalah baru yang akan dialami oleh penduduk kota seperti tingkat kriminalitas, kemiskinan, pengangguran dan banyaknya pemukiman kumuh (Bandiyono, 2016). Maka dengan adanya aktivitas urbanisasi penduduk menjadi faktor utama bagi kota untuk dinilai secara fisik maupun lingkup sosial, yang dalam konteks tidak hanya memiliki efek positif tetapi juga negatif yang ditimbulkan oleh kehidupan di perkotaan.

Menurut laporan Bank Dunia pada tahun 2021, jumlah populasi di Indonesia yang tinggal di perkotaan meningkat hingga hingga 57,29 persen. Jumlah populasi terpadat penduduk yang mencapai 273 juta jiwa. Penduduk perkotaan yang menyumbang paling tinggi ada di provinsi DKI Jakarta karena kota tersebut merupakan ibukota negara, Selain itu beberapa kota yang memiliki penduduk yang padat lainnya seperti Surabaya, Bandung, Tangerang, dan Bekasi. Menariknya mengenai tingkat laju urbanisasi terbesar di Indonesia berada pada di Pulau Jawa. Tingkat urbanisasi di Pulau Jawa berdasarkan tingkat provinsi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Persentase Urbanisasi di Pulau Jawa tahun 2016 – 2021

Provinsi	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
DKI Jakarta	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Jawa Barat	74.2	75.4	76.7	77.9	78.7	79.5
Jawa Tengah	48.9	49.4	49.9	50.4	51.3	52.1
DI Yogyakarta	71.3	72.1	72.9	73.7	74.6	75.3
Jawa Timur	51.6	52.1	52.6	53.1	54.7	55.4
Banten	68.2	68.6	69.1	69.5	69.9	70.3

Sumber: Data Badan Pusat Statistik

Dari tabel di atas menunjukkan angka tingkat urbanisasi tiap provinsi di Pulau Jawa meningkat setiap tahun. Di mulai dari ledakan penduduk hingga masalah pekerjaan menjadi faktor pendorong dari urbanisasi. Provinsi DKI Jakarta menyumbang angka terbesar dan setiap tahun selalu di angka 100 persen, karena ibukota negara banyak menjadi tujuan bagi kaum urbanisasi. Sedangkan selain provinsi DKI Jakarta tingkat urbanisasinya hanya di bawah angka 100 persen. Tingkat urbanisasi diproyeksikan akan meningkat secara terus-menerus dari adanya pertumbuhan penduduk di Pulau Jawa.

Negara Indonesia merupakan yang masih dalam tahap negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar. Hal yang menjadi keunggulan Indonesia terlihat dari kependudukan yang terdiri dari banyak pulau, beragam budaya, ratusan suku dan bahasa daerah. Terutama Pulau Jawa yang dikenal dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang baik. Menurut Sensus Penduduk (SP 2015), Pulau Jawa memiliki dengan luas wilayah 128.297 km^2 dan kepadatan penduduk sebesar 20.902 jiwa/km^2 . Hal ini yang menunjukkan bahwa Pulau Jawa adalah pulau terpadat di

Indonesia. Salah satu yang menjadi daerah terpadat di Pulau Jawa dengan keberadaan ibukota Indonesia yaitu Daerah Khusus Ibukota (DKI Jakarta). Kota metropolitan tersebut sebagai salah satu daya magnet penduduk luar daerah mencari tempat tujuan bagi setiap orang untuk mencari segala kebutuhan hidup ataupun pengalaman yang ingin di dapat oleh kaum urbanisasi. Adanya perpindahan penduduk dari desa dengan tujuan ke kota maka harapannya memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi.

Peran pertumbuhan ekonomi sangat penting untuk mendukung keadaan sosial ekonomi di suatu daerah. Ada faktor yang berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi wilayah yang bersangkutan dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam kebijakan ekonomi makro dijelaskan bahwa pusat ekonomi berada di perkotaan dan menggabungkan antara kebijakan sektor manufaktur dan investasi asing. Hal tersebut menimbulkan *polarisasi* pembangunan ekonomi terpusat di kota (Halim a, 2020). Urbanisasi tidak hanya sebagai akibat tetapi juga menjadi sebab adanya pembangunan ekonomi. Selain itu, adanya peningkatan jumlah penduduk akan berdampak pada meningkatnya angkatan kerja. Meningkatnya jumlah tenaga kerja pada gilirannya dapat meningkatkan *output* produksi barang dan jasa. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel tingkat pertumbuhan ekonomi di bawah ini:

Tabel 2. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Di Pulau Jawa Tahun 2016 – 2021

Provinsi	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jakarta	5.87	6.20	6.11	5.82	-2.39	3.56
Jawa Barat	5.66	5.33	5.65	5.07	-2.52	3.74
Jawa Tengah	5.25	5.26	5.30	5.40	-2.65	3.32
Yogyakarta	5.05	5.26	6.20	6.59	-2.68	5.53
Jawa Timur	5.57	5.46	5.47	5.52	-2.33	3.57
Banten	5.28	5.75	5.77	5.29	-3.39	4.44

Sumber: data Badan Pusat Statistik

Pertumbuhan ekonomi pada setiap provinsi di Pulau Jawa berfluktuasi dari tahun 2016 - 2021. Tahun 2020 dimana seluruh ekonomi dunia mengalami penurunan karena adanya bencana global pandemi COVID-19. Faktor yang menjadi penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi karena adanya ketidakstabilan pada perekonomian. Jumlah penduduk meningkat dan bonus demografi yang tidak terkendali menjadi permasalahan pertumbuhan ekonomi tidak stabil.

Schumpeter memberikan pendapat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses peningkatan pendapatan per kapita dan pendapatan total, dengan mempertimbangkan ketersediaan penambahan jumlah penduduk pada perubahan kota. Pertumbuhan ekonomi sangat penting berpengaruh dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah.

Salah satu parameter yang menjadikan masyarakat melakukan urbanisasi yaitu dalam hal segi perkembangan upah. Masyarakat ingin mendapatkan hasil upah yang diperoleh lebih besar dibanding daerah asal (Hidayati, 2018). Fenomena urbanisasi menimbulkan hubungan secara berkesinambungan dengan pertumbuhan ekonomi pada

pusat perekonomian yang ada di perkotaan. Keadaan yang terjadi di masyarakat berbeda dengan ekspektasi yang diharapkan ketika melakukan perpindahan dari desa ke kota, dengan bersedia siap bersaing dalam dunia kerja yang tidak sebanding sesuai dengan persyaratan pekerjaan yang dipersyaratkan oleh instansi atau perusahaan industri. Berikut adalah tabel tingkat perkembangan upah:

Tabel 3. Tingkat Perkembangan Upah Di Pulau Jawa Tahun 2016 – 2021

Provinsi	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jakarta	3.100.000	3.355.750	3.658.035	3.940.973	4.276.349	4.452.724
Jabar	1.312.355	1.420.624	1.544.361	1.668.372	1.810.350	1.841.487
Jateng	1.265.000	1.367.000	1.486.226	1.605.394	1.742.784	1.798.011
DIY	1.237.700	1.337.645	1.454.154	1.570.922	1.704.607	1.765.951
Jatim	1.273.490	1.388.000	1.508.895	1.630.059	1.768.777	1.891.567
Banten	1.807.600	1.784.000	2.099.385	2.267.965	2.460.968	2.501.203

Sumber: data Badan Pusat Statistik

Pada tabel 1.3 di atas dapat diketahui bahwa perkembangan Upah Minimum di Pulau Jawa setiap tahunnya meningkat. Provinsi Jakarta tahun 2021 sudah mencapai angka Rp4.452.724. Hal ini menjadi motivasi bagi masyarakat yang ingin mencari pekerjaan dengan hasil pendapatan yang lebih dari sebelumnya dengan melakukan urbanisasi. Pendapatan yang meningkat dipengaruhi pula pada kebutuhan pokok sehari-hari. Harapan tingkat pendapatan yang lebih tinggi dapat menjanjikan untuk melakukan urbanisasi walaupun di sisi lain urbanisasi juga akan memberikan dampak meningkatnya jumlah penduduk pada daerah kota.

Dalam pembangunan ekonomi indikator kesempatan kerja masih menjadi yang terpenting. Ketika suatu wilayah dalam pembangunan tidak dapat mengoptimalkan

perekrutan tenaga kerja dari populasi yang besar menyebabkan peningkatan tingkat pengangguran (Rahadi, 2014). Dalam upaya mengurangi angka pengangguran, kebijakan tenaga kerja sangat diperlukan.

Tabel 4. Tingkat Kesempatan Kerja Di Pulau Jawa Tahun 2016 – 2021

Provinsi	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
DKI Jakarta	94.23	94.64	94.27	94.50	94.85	91.49
Jawa Barat	91.43	91.51	91.78	92.22	92.29	91.08
Jawa Tengah	95.80	95.85	95.81	95.81	95.80	94.04
DI Yogyakarta	97.19	97.16	97.00	97.11	96.62	96.72
Jawa Timur	95.86	95.90	96.23	96.23	96.40	94.83
Banten	92.05	92.25	92.28	92.45	92.01	90.99

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel 1.4 di atas, dapat diketahui bahwa tingkat kesempatan kerja di Pulau Jawa berfluktuasi dari tahun 2016 ke tahun 2021. Data pertumbuhan kesempatan kerja dihitung sesuai dengan jumlah tenaga kerja yang terserap di Pulau Jawa. Kesempatan kerja tertinggi ada di Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2016 mencapai 97,19 persen.

Aspek kesempatan kerja di Indonesia menjadi bagian dari usaha pembangunan ekonomi dalam berbagai sektor lapangan kerja yang membutuhkan tenaga kerja, mempunyai keterampilan dan kualifikasi tertentu di bidangnya. Berbagai lapangan pekerjaan terbuka pada setiap daerah di Indonesia. Namun jumlah angkatan kerja lebih tinggi dibandingkan kuota lapangan pekerjaan yang tersedia.

Ketidakseimbangan antara pekerjaan dan jumlah penduduk yang besar membuat pertumbuhan yang ada tidak dapat menyerap tenaga kerja. Hal tersebut akan mengakibatkan angka pengangguran meningkat setiap tahunnya. Upaya untuk meningkatkan kesempatan kerja sangat penting, karena masyarakat didesa masih bergantung dari pendapatan sektor pertanian.

Tabel 5. Tingkat Pengangguran Di Pulau Jawa Tahun 2016 - 2021

Provinsi	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
DKI Jakarta	6.12	7.14	8.04	7.50	10.34	8.50
Jawa Barat	8.89	8.22	6.65	6.54	10.95	9.82
Jawa Tengah	4.63	4.57	8.23	8.04	10.46	5.95
DIY	2.72	3.02	4.47	4.44	6.48	4.56
Jawa Timur	4.21	4.00	3.37	3.82	5.84	5.74
Banten	8.92	9.28	3.97	8.11	10.64	8.98

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa tingkat pengangguran pada setiap provinsi di Pulau Jawa dari tahun 2016 – 2021 mengalami fluktuatif. Angka tertinggi berada di tahun 2020 Provinsi Jawa Barat mencapai 10,95 persen. Kemudian disusul oleh Provinsi Banten mencapai 10,64 persen, Provinsi Jawa Tengah sebesar 10,46 persen, dan Provinsi Jakarta sebesar 10,34 persen. Dari keempat provinsi tersebut, angka tingkat pengangguran tertinggi sebesar masing-masing 10 persen. Tahun 2020 merupakan adanya bencana global pandemi COVID-19. Kondisi tersebut membuat masyarakat merasakan imbas dari bencana kesehatan tersebut. Mulai dari pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan, pendapatan hingga investasi menjadi terhambat dengan

proses perekonomian masyarakat yang kemudian berdampak kepada tingkat pengangguran di tahun 2020 meningkat.

Pengangguran merupakan bagian dari masalah ketenagakerjaan yang dialami setiap daerah, khususnya di Pulau Jawa. Pengangguran memang menjadi suatu permasalahan yang perlu ditangani untuk perekonomian (Rakasiwi, 2019). Tingkat pertumbuhan penduduk semakin meningkat di setiap tahun akan menyebabkan meningkatnya angkatan kerja. Persoalan tingkat pengangguran meningkat akan membawa dampak perekonomian yang negatif. Menurut BPS pada Sensus 2010, definisi pengangguran merupakan orang-orang yang telah memasuki pasar tenaga kerja (usia 15 – 64 tahun) masih mencari pekerjaan dan belum mendapatkan pekerjaan.

Dalam penelitian Ahari & Mahmud (2018), kesempatan kerja di Pulau Jawa memiliki potensi yang menunjukkan dapat menyerap tenaga kerja, hingga mobilitas urbanisasi akan mengalami proses perubahan yang cepat. Berbagai mobilitas penduduk pedesaan di kota memiliki faktor yang menarik karena menimbulkan ketersediaannya lembaga pendidikan yang berbeda, kesempatan kerja, hiburan dan berbagai fasilitas lainnya. Penduduk urban melakukan perpindahan merupakan bagian cara untuk memperoleh hidup yang layak, nyaman dan kesejahteraan.

Pembangunan di Pulau Jawa mampu mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan, dan pendidikan. Berbagai kondisi tatanan dan struktur ekonomi yang berbeda-beda di wilayah Indonesia, Pulau Jawa menjadi jumlah penduduk terpadat di Indonesia yang menyebabkan terjadinya ledakan tingkat

urbanisasi (Teja, 2015). Di ketahui beberapa provinsi Pulau Jawa seiring bertambahnya tahun mengalami tingkat pertumbuhan urbanisasi yang meningkat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan tentang peristiwa dan fakta yang terjadi di Pulau Jawa beberapa tahun mengenai faktor-faktor yang mempengaruhinya terhadap urbanisasi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Urbanisasi di Pulau Jawa?
2. Bagaimana pengaruh Upah Minimum terhadap Urbanisasi di Pulau Jawa?
3. Bagaimana pengaruh Kesempatan Kerja terhadap Urbanisasi di Pulau Jawa?
4. Bagaimana pengaruh Pengangguran terhadap Urbanisasi di Pulau Jawa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Urbanisasi di Pulau Jawa.
2. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum terhadap Urbanisasi di Pulau Jawa.
3. Untuk mengetahui pengaruh Kesempatan Kerja terhadap Urbanisasi di Pulau Jawa.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pengangguran terhadap Urbanisasi di Pulau Jawa.

D. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi dengan dampak Urbanisasi yang terjadi pada wilayah perkotaan. Untuk mengambil kebijakan tersebut perlu adanya campur tangan pemerintah dalam mengendalikan Urbanisasi. Ketika tidak terkendali maka akan

menyebabkan dampak dan berpengaruh pada lingkungan sosial seperti kemiskinan, pengangguran dan kriminalitas.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan juga wawasan terhadap masyarakat secara teori tentang urbanisasi

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian diharapkan dapat menjadi referensi terhadap para peneliti yang mengambil topik yang sama dimasa mendatang.

b. Bagi pemerintah

Dimaksudkan untuk memberikan informasi sekaligus sebagai bahan pertimbangan kebijakan dalam Membantu pengendalian urbanisasi di Provinsi Pulau Jawa.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian diharapkan agar masyarakat mengetahui keadaan sebenarnya tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terhadap urbanisasi di Pulau Jawa

F. Ruang lingkup penelitian

Ruang lingkup penelitian meliputi wilayah faktor – faktor seberapa besar pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah minimum, Kesempatan Kerja, dan Pengangguran terhadap Urbanisasi di Pulau Jawa dari tahun 2016 –2021.

